



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

**Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan
Daerah**

Tahun 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Laporan Kinerja (LAKIP) tahun 2021 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan kinerja ini adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang menyebutkan bahwa setiap pemimpin departemen/lembaga pemerintah non departemen, pemerintah daerah, satuan kerja atau unit kerja didalamnya, wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya.

Dalam Laporan kinerja ini disajikan secara sistematis berdasarkan kondisi obyektif hasil-hasil yang dicapai oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 dengan mempergunakan tolak ukur perjanjian kinerja masing-masing jabatan struktural.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dimasa datang.

Malili, Februari 2022

Kepala Bapelitbangda,

Dis. DOHRI AS'ARI

Pangkat Pembina Utama Muda

Nip. 19670912 198811 1 003

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi	2
1.3. Isu Strategis	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1. Rencana Strategis	6
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	7
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	10
3.2. Realisasi Anggaran	44
BAB IV PENUTUP	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. STRUKTUR ORGANISASI
- 1.3. ISU-ISU STRATEGIS

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Keberhasilan atau kegagalan akan terlihat dari pertanggungjawaban yang dilakukannya, selama ini pengukuran kinerja lebih ditekankan pada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran terlepas dari manfaat, keuntungan dan dampak yang ditimbulkan. Tahun 2021 merupakan tahun akhir dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda).

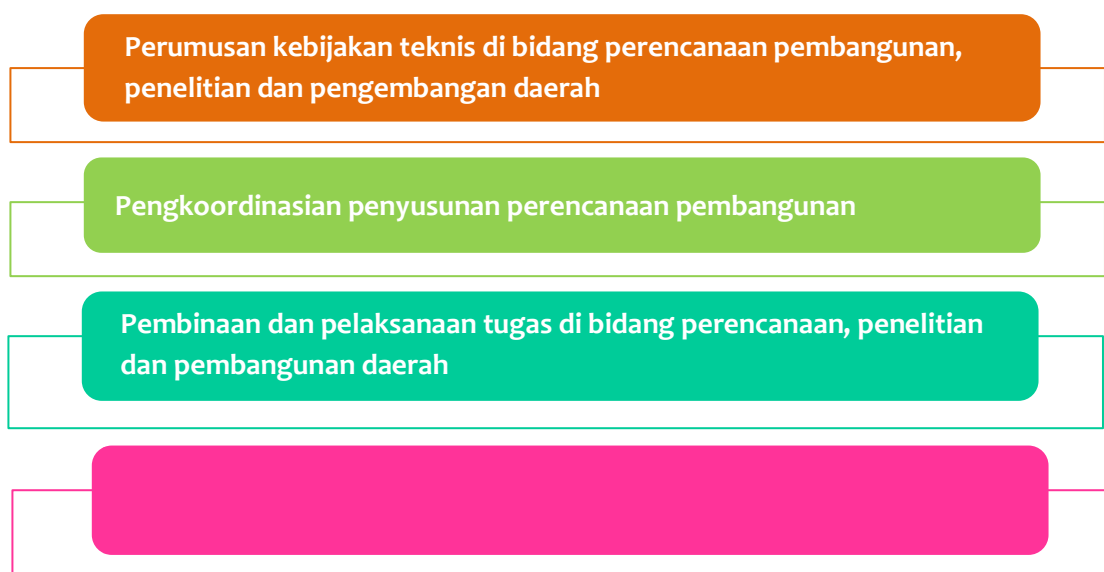
Laporan kinerja Tahun 2021 ini merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) sesuai dengan target

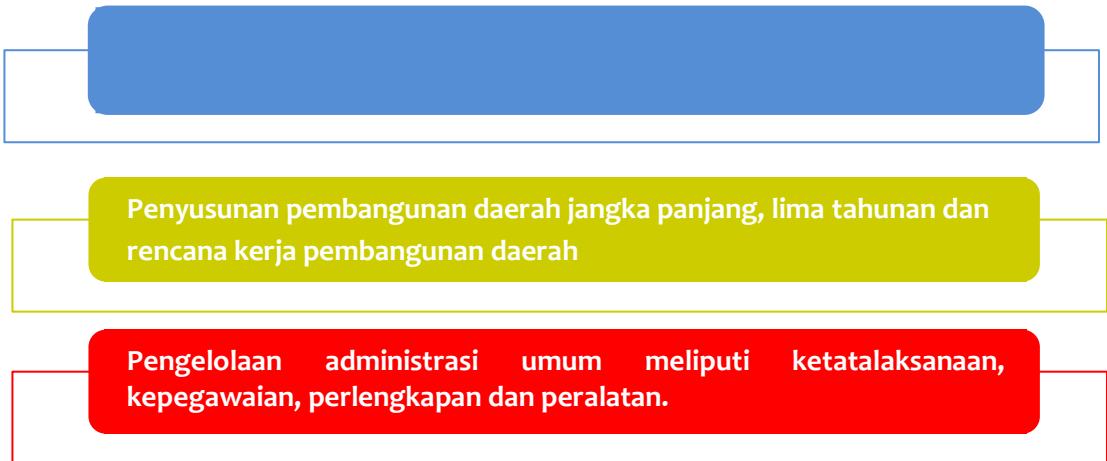
yang telah diperjanjikan oleh masing-masing pejabat struktural. Melalui laporan ini akan tergambar hal-hal yang sudah tercapai dan belum tercapai serta strategi yang harus dilakukan agar capaian kinerja dapat dimaksimalkan sampai akhir tahun 2021.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Pembentukan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, selajutnya dilakukan beberapa revisi terakhir dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah.

Kedudukan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan :





Penyusunan pembangunan daerah jangka panjang, lima tahunan dan rencana kerja pembangunan daerah

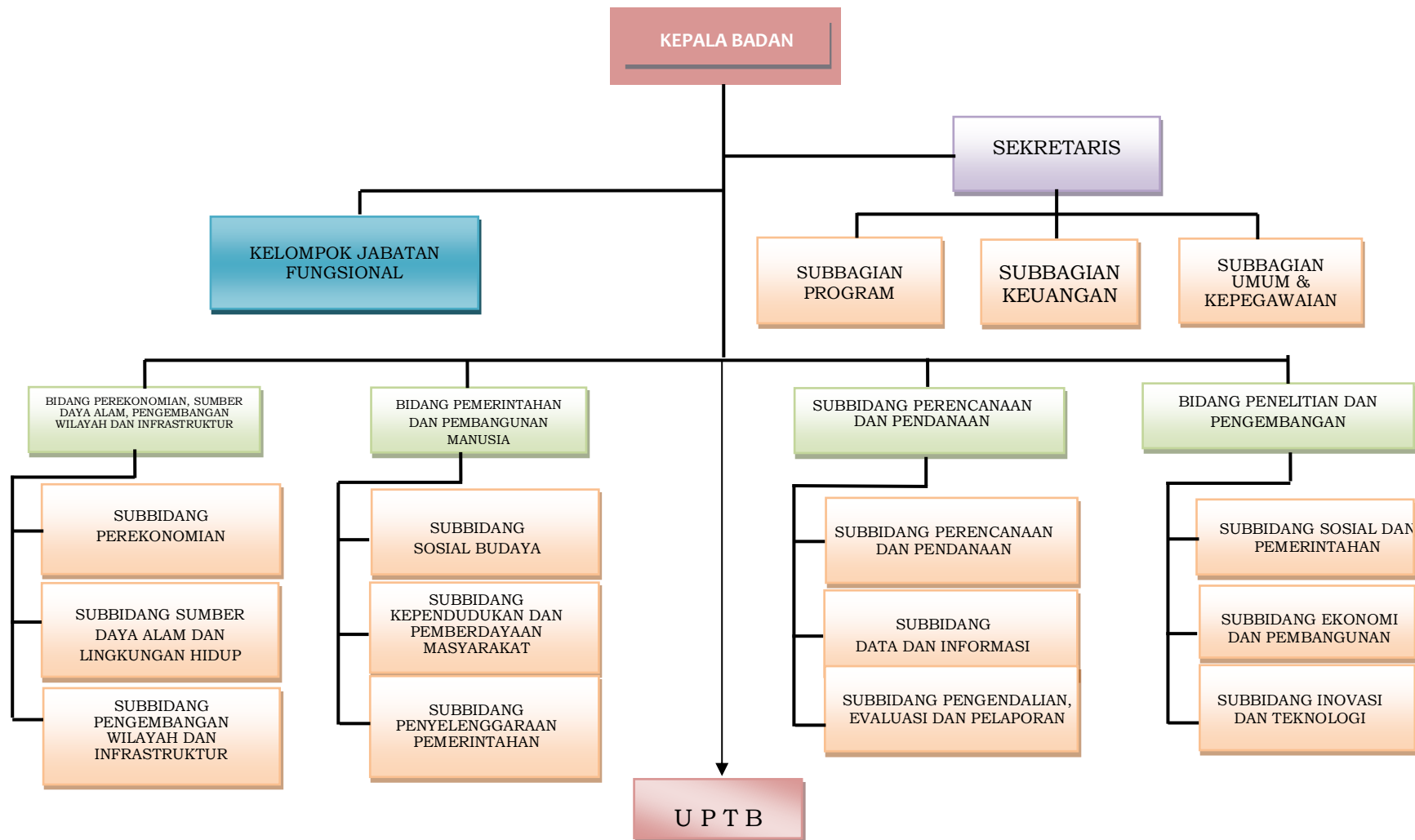
Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) dibantu oleh aparat yang terdapat di dalam struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda). Susunan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - Subbagian Program;
 - Subbagian Keuangan; dan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah Dan Infrastruktur, terdiri atas:
 - Subbidang Perekonomian;
 - Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - Subbidang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur.
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
 - Subbidang Sosial Budaya;
 - Subbidang Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan.

-
5. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas:
 - Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - Subbidang Data dan Informasi; dan
 - Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:
 - Subbidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - Subbidang Sosial dan Pemerintahan; dan
 - Subbidang Inovasi dan Teknologi.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 8. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor : 39 Tahun 2019 struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada gambar 1, sebagai berikut :



Gambar 01. Struktur Organisasi Bapelitbangda, Kab. Luwu Timur

1.3. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur, maka dapat diidentifikasi, beberapa hal sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) dengan perangkat lain yang sering kali menyebabkan belum konsistennya dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Belum optimalnya sistem pengelolaan dan pemanfaatan data-data statistik pembangunan yang akurat;
3. Belum optimalnya hasil monitoring dan evaluasi pembangunan sebagai bahan penyusunan perencanaan;
4. Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;
5. Belum dimanfaatkannya secara optimal hasil-hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan.

BAB II

PERANCANAAN KINERJA

- 2.1. RENCANA STRATEGIS
- 2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA
- 2.3. PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS



encana strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur

disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), yang selanjutnya Rencana strategis tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Tujuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) menggambarkan arah strategi dan peluang-peluang yang ingin diciptakan untuk mencapai Visi Misi Tahun 2016-2021 adalah:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;
2. Menumbuhkan inovasi daerah.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Berikut disajikan sasaran strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) :

1. Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatnya usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah;

4. Terciptanya penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
5. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah.

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator kinerja utama merupakan indikator strategis yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki suatu organisasi.

Indikator kinerja utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
(Bapelitbangda) Kab. Luwu Timur

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahunan					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)	94,81	97,25	97,97	98,73	99,32	99,32
2	Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen RKPD (%)	42,86	43,87	44,43	44,54	44,77	44,77
3	Nilai SAKIP	45,54	55,86	58,28	62,35	70,01	70,01
4	Persentase perangkat daerah yang menghasilkan inovasi daerah (%)	33,33	33,33	38,46	38,46	41,03	41,03
5	Persentase pemanfaatan hasil kelitbang/inovasi	10,00	10,00	16,67	25,00	33,33	33,33

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan/perjanjian yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dengan adanya perjanjian kinerja diharapkan dalam mengelola program, kegiatan dan sub kegiatan akan lebih baik dan terarah. Dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) tahun 2021 tertuang bahwa untuk mencapai target sasaran sesuai Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) melaksanakan 4 Program, 18 Kegiatan dan 52 sub kegiatan, yang di dalamnya juga mencantumkan rencana anggaran per program.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)	99,32
2.	Terwujudnya perencanaan yang partisipatif	Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen RKPD (%)	44,77
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	70,01
4.	Terciptanya penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase perangkat daerah yang menghasilkan inovasi daerah (%)	41,03
5.	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan/inovasi	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan/inovasi (%)	33,33

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten./Kota	Rp 4.934.414.548	APBD Kabupaten
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 2.066.248.525	APBD Kabupaten
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.696.769.600	APBD Kabupaten
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 794.734.907	APBD Kabupaten

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.2. REALISASI ANGGARAN

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI



akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

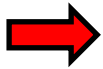
Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada masing-masing sasaran di peroleh nilai pencapaian kinerja. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja (penentuan posisi) berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Pengukuran capaian kinerja tahun 2021 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap target perjanjian kinerja tahun 2021 yang telah disepakati antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Berikut disajikan capaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Tahun 2021 :



Sasaran 1 : Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel 3.2
Analisis Pencapaian Sasaran 1

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
1.	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	99,32	98,94	99,61

Pencapaian indikator sasaran ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

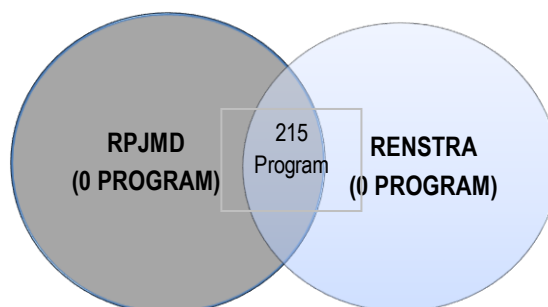
$$\text{Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah} = \frac{K1 + K2 + K3 + K4}{4}$$

1). Persentase Keselarasan Program Renstra terhadap RPJMD (K1)

Indikator Ini di ukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase keselarasan program Renstra terhadap RPJMD} &= \frac{\text{Jumlah program Renstra tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100\% \\ &= \frac{215}{215} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hitungan tersebut dapat digambarkan bahwa semua program pada RPJMD tahun 2021 digunakan dalam Renstra perangkat daerah tahun 2021 (konsisten).



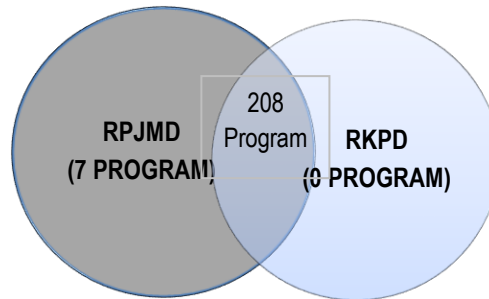
Gambar 02. Keselarasan Program Renstra terhadap RPJMD

2). Persentase Keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD (K2)

Indikator Ini di ukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} & & \text{Jumlah program RKPD tahun berkenaan} \\
 \text{keselarasan program} & = & \text{-----} \times 100 \% \\
 \text{RKPD terhadap} & & \text{Jumlah program RPJMD yang harus} \\
 \text{RPJMD} & & \text{dilaksanakan tahun berkenaan} \\
 & & \\
 & = & \frac{208}{215} \times 100 \% \\
 & = & 96,74 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hitungan tersebut dapat digambarkan bahwa Ada 7 program pada RPJMD yang tidak digunakan dalam RKPD Tahun 2021, hal ini berdasarkan analisa kebutuhan sesuai tema prioritas pembangunan pada Tahun 2021 dan hasil cascading penyelarasan sasaran, tujuan, dan program.



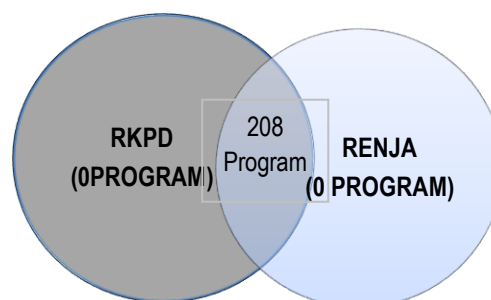
Gambar 03. Keselarasan antara program RKPD terhadap RPJMD

3). Persentase Keselarasan Program Renja terhadap RKPD (K3)

Indikator Ini di ukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} & & \text{Jumlah program Renja tahun berkenaan} \\
 \text{keselarasan program} & = & \text{-----} \times 100 \% \\
 \text{Renja terhadap RKPD} & & \text{Jumlah program RKPD yang harus} \\
 & & \text{dilaksanakan tahun berkenaan} \\
 & = & \frac{208}{208} \times 100 \% \\
 & = & 100 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hitungan tersebut dapat digambarkan bahwa semua program pada RKPD tahun 2021 digunakan dalam Renja perangkat daerah tahun 2021 (konsisten).



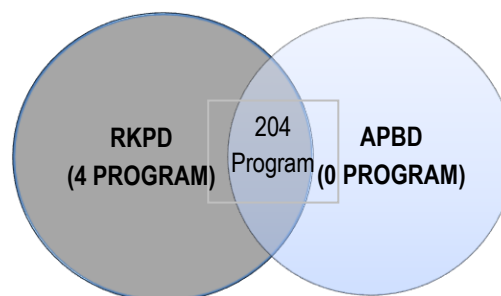
Gambar 04. Keselarasan program Renja terhadap RKPD

4). Persentase Keselarasan Program APBD terhadap RKPD (K4)

Indikator Ini di ukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} & & \text{Jumlah program APBD tahun berkenaan} \\
 \text{keselarasan program} & = & \text{Jumlah program RKPD yang harus} \\
 \text{APBD terhadap RKPD} & & \text{dilaksanakan tahun berkenaan} \\
 & & \text{-----} \times 100 \% \\
 & & \\
 & = & \frac{204}{208} \times 100 \% \\
 & = & 98,07 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hitungan tersebut dapat digambarkan bahwa Ada 4 program pada RKPD tahun 2021 yang tidak digunakan dalam APBD tahun 2021, hal ini berdasarkan analisa kebutuhan sesuai tema prioritas pembangunan pada Tahun 2021 dan hasil cascading penyelarasan program.



Gambar 05. Keselarasan program Renja terhadap RKPD

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2020 :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} & & 100 \% + 96,74 \% + 100 \% + 98,07 \% \\
 \text{keselarasan antar} & = & \text{-----} \\
 \text{dokumen} & & 4 \\
 \text{perencanaan} & & \\
 \text{pembangunan} & & \\
 \text{daerah} & = & 98,70 \%
 \end{aligned}$$

Nilai capaian kinerja program ini merupakan **kategori sangat Tinggi**.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.3
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	98,70	97,61

Dari tabel tersebut diketahui bahwa secara umum indikator persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah berjalan sangat baik setiap tahunnya karena adanya pengendalian evaluasi penyusunan dokumen perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu Timur telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penyelarasan sasaran, tujuan, dan program.

c. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Renstra (2016-2021)

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Akhir Renstra Sasaran 1

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Target Akhir Renstra (2021)	Realisasi 2021	% Capaian
1	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	99.32	98.70	99,37

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara umum indikator persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah sampai akhir tahun renstra sangat baik dan terealisasi maksimal sesuai harapan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian sasaran terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah antara lain :

- Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antar perangkat daerah;
- Penggunaan sistem informasi berbasis E-planning dan E-Monev, sehingga tahapan perencanaan, penganggaran dan pengawasan dapat berjalan maksimal.

Beberapa permasalahan yang mempengaruhi pencapaian sasaran tersebut antara lain :

- Adanya perubahan target pendapatan, yang berdampak pada beberapa program/kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan (efisiensi belanja).
- Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;
- Adanya beberapa jabatan struktural yang masih kosong, khususnya jabatan kasubag perencanaan, sehingga kesulitan pada saat asistensi dan penyusunan dokumen perencanaan.

Alternatif solusi yang dilakukan dalam pencapaian target sasaran tersebut antara lain :

- Memaksimalkan realisasi sesuai target yang telah ditentukan sehingga pelaksanaan program/kegiatan sesuai target perencanaan;
- Standarisasi program dan kegiatan serta indikatornya melalui review usulan rencana kerja perangkat daerah;
- Mengevaluasi efektifitas dan efisiensi rumusan program serta kegiatan dengan lebih memfokuskan kepada hasil yang diharapkan;
- Memaksimalkan koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, dalam hal menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi dalam proses penganggaran;

- Mengoptimalkan sistem pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi berbasis E-planning, E-Budgeting dan E-Monev secara akurat dan berkesinambungan;
- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan tugas dan kewajiban;
- Mengusulkan ke pimpinan untuk segera mengisi beberapa jabatan struktural yang masih kosong, khususnya jabatan kasubag perencanaan agar penyusunan serta pengendalian dokumen perencanaan di perangkat daerah dapat berjalan maksimal.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sistem informasi berbasis E-planning, E-Budgeting dan E-Monev merupakan strategi dalam pencapaian sasaran kinerja ditengah terbatasnya jumlah pegawai.

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah, antara lain :

- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai peraturan. Jumlah dokumen yang ditetapkan sesuai target yaitu sebanyak 3 dokumen (100%). Nilai capaian kinerja program ini merupakan **kategori sangat tinggi**. Pada tahun 2021, sebanyak 4 dokumen perencanaan yang biasanya disusun oleh Bapelitbangda dialihkan ke Badan pengelolaan keuangan daerah. Adapun dokumen yang dimaksud adalah dokumen KUA-PPAS. Realisasi anggaran sebesar Rp 1.576.018.083,- atau 76,27% dari pagu anggaran Rp 2.066.248.525,-, merupakan **kategori tinggi**. Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh Bapelitbangda pada tahun 2021 dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Dokumen	Tanggal Penetapan	Ket
1	RKPD Tahun 2022	1 Juli 2021	Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2021
2	RKPD Perubahan Tahun 2021	18 Agustus 2021	Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2021
3	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2020	24 Maret 2021	Rekomendasi DPRD

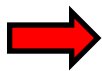
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tahun 2021 direalisasikan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 13 (tigabelas) sub kegiatan. Adapun nama kegiatan/sub kegiatan, target dan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Kinerja					Ket
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Dokumen	3	3	100.00	Mencapai Target
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rumusan analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah	Dokumen	1	1	100.00	Mencapai Target
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan	Dokumen	1	1	100.00	Mencapai Target

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Kinerja					Ket
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah dokumen berita acara forum konsultasi publik	Dokumen	2	2	100.00	Mencapai Target
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah dokumen berita acara forum SKPD/Lintas SKPD	Dokumen	2	2	100.00	Mencapai Target
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen berita acara musrenbang kabupaten	Dokumen	2	2	100.00	Mencapai Target
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah laporan bahan musrenbang kecamatan	Laporan	1	1	100.00	Mencapai Target
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	Dokumen	4	4	100.00	Mencapai Target
2	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah berbasis aplikasi	Aplikasi	1	1	100.00	Mencapai Target
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah aplikasi yang menyajikan data pokok dan informasi	Aplikasi	1	1	100.00	Mencapai Target
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah laporan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Laporan	4	4	100.00	Mencapai Target
	Penyusunan Buku Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil Kabupaten Luwu Timur	Buku	1	1	100.00	Mencapai Target
3.	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan, Pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah yang disusun sesuai regulasi	Dokumen	9	9	100.00	Mencapai Target
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan	Laporan	2	2	100.00	Mencapai Target

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Kinerja					Ket
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan kerja sama daerah yang disusun tepat waktu	Laporan	1	1	100.00	Mencapai Target
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu	Laporan	6	6	100.00	Mencapai Target


Sasaran 2 : Terwujudnya perencanaan yang partisipatif
a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Target 2021	Realisasi	%
1	Terwujudnya perencanaan yang partisipatif	Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen RKPD	%	44,77	40,83	91,19

Pencapaian indikator sasaran ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &\text{Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen RKPD} = \frac{\text{Jumlah usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen RKPD}}{\text{Jumlah usulan musrenbang RKPD}} \\
 &= \frac{363}{889} \\
 &= 40,83\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya perencanaan yang partisipatif tahun 2021 diperoleh nilai sebesar 40,83% atau sebesar 91,19% dari target kinerja tahun 2021 yaitu 44,77%. Nilai capaian kinerja program ini merupakan **kategori sangat tinggi**. Berikut disajikan hasil usulan musrenbang RKPD berdasarkan perangkat daerah :

Tabel 3.9
Jumlah Usulan Musrenbang Berdasarkan Perangkat Daerah

No.	Nama OPD	Jumlah Usulan Musrenbang	Jumlah Usulan Yang Sesuai (Hasil Investigasi)	Jumlah Usulan yang Diakomodir Dalam RKPD	%
1	Dinas PUPR	372	260	189	50,80
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	246	165	73	29,67
3	Dinas Pertanian	110	90	36	32,72
4	Dinas Pendidikan	61	27	25	40,98
5	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	47	13	10	21,27
6	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6	4	2	33,33
7	DinasS Kelautan, Perikanan dan Pangan	15	10	6	40,00
8	Dinas Kesehatan	32	24	22	68,75
JUMLAH		889	593	363	40,83

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.10
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1	Terwujudnya perencanaan yang partisipatif	Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen RKPD	%	40,83	38,75	35,14

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara umum indikator Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen RKPD berjalan dengan baik setiap tahunnya.

c. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Renstra (2016-2021)

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Akhir Renstra

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Target Akhir Renstra (2020)	Realisasi 2021	%
1	Terwujudnya perencanaan yang partisipatif	Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen RKPD (%)	%	44,77	40,87	91,19

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara umum indikator Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen RKPD sampai tahun 2021 semakin baik, dan diharapkan kondisi tersebut dapat terus terjaga.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian sasaran terwujudnya perencanaan yang partisipatif antara lain :

- Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah;
- Penggunaan sistem informasi berbasis E-Musrenbang dan E-Pokir, sehingga tahapan perencanaan, penganggaran dan pengawasan dapat berjalan maksimal.

Beberapa permasalahan yang mempengaruhi pencapaian sasaran terwujudnya perencanaan yang partisipatif antara lain :

- Keterbatasan anggaran sehingga beberapa usulan tidak dapat diakomodir, seperti diketahui bahwa selama 2 tahun belakangan pemerintah kabupaten luwu timur melakukan refocusing untuk penanganan kasus covid-19.
- Mayoritas usulan musrenbang merupakan pembangunan fisik (konstruksi) seperti pengaspalan jalan, pembangunan/perbaikan drainase, pembentukan/peningkatan jalan usaha tani/jalan produksi, pembangunan jembatan, Pembangunan jides, pembangunan bronjong/talud/proteksi, pembangunan RKB, Pembangunan pustu dan pembangunan poskesdes;
- Beberapa usulan bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Usulan tidak masuk prioritas pembangunan;
- Tidak dilengkapi dengan data-data pendukung yang sesuai.

Alternatif solusi yang dilakukan pencapaian sasaran terwujudnya perencanaan yang partisipatif antara lain :

- Menyampaikan lebih awal kegiatan prioritas pembangunan daerah kepada masing-masing kecamatan (rancangan awal RKPD dan Renja perangkat daerah);
- Masing-masing kecamatan mengidentifikasi usulan yang betul-betul prioritas dan sesuai dengan rancangan awal RKPD dan Renja perangkat daerah;
- Mengurutkan usulan berdasarkan prioritasnya.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sistem informasi berbasis E-Musrenbang dan E-planning merupakan strategi dalam pencapaian sasaran kinerja.

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran terwujudnya perencanaan yang partisipatif antara lain :

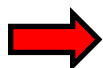
- Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
 Program ini diukur dengan menggunakan indikator persentase pemanfaatan laporan koordinasi/dokumen perencanaan pembangunan daerah. Capaian kinerjanya sebesar 100%. Nilai capaian kinerja program ini merupakan **kategori sangat tinggi**. Realisasi keuangan sebesar Rp 1.286.308.363,- atau 75,81% dari pagu anggaran Rp 1.696.769.600,. Merupakan **kategori sedang**. Program ini dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah setiap organisasi perangkat daerah. Adapun program ini direalisasikan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 14 (empatbelas) sub kegiatan. Adapun nama kegiatan/sub kegiatan, target dan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Kinerja					Ket
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
1.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase laporan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun	%	100	100	100.00	Mencapai Target

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang disusun	Dokumen	3	3	100.00	Mencapai Target
No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Kinerja					Ket
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan yang disusun	Dokumen	4	4	100.00	Mencapai Target
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang disusun	Dokumen	4	4	100.00	Mencapai Target
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia yang disusun	Dokumen	4	4	100.00	Mencapai Target
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang disusun	Dokumen	4	4	100.00	Mencapai Target
2.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase laporan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA yang disusun	%	100	100	100	Mencapai Target
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan bidang ekonomi yang disusun	Laporan	4	4	100	Mencapai Target
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil koordinasi dan asistensi pemanfaatan DBH pajak rokok yang disediakan	Laporan	4	4	100	Mencapai Target

	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi bidang perekonomian	Laporan	4	4	100	Mencapai Target
No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Kinerja					Ket.
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan bidang ekonomi yang disediakan	Laporan	4	4	100	Mencapai Target
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi READ-SI yang disediakan	Laporan	4	4	100	Mencapai Target
3.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase laporan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur	Laporan	4	4	100	Mencapai Target
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan pengembangan infrastruktur dan wilayah yang dihasilkan	Laporan	4	4	100	Mencapai Target
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil penganagan air minum dan sanitasi masyarakat	Laporan	4	4	100	Mencapai Target
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan infrastruktur dan wilayah	Laporan	4	4	100	Mencapai Target
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan kawasan perdesaan prioritas nasional yang didampingi	Laporan	4	4	100.00	Mencapai Target



Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel 3.15
Analisis pencapaian kinerja sasaran 3

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	%
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	%	70,01	70,87	101,22

Metodelogi yang digunakan dalam evaluasi atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah adalah menggunakan LKE (Lembar Kerja Evaluasi) dengan komponen sebagai berikut :

Tabel 3.16
Lembar Kerja Evaluasi (LKE)

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30
2	Pengukuran Kinerja	25
3	Pelaporan Kinerja	15
4	Evaluasi Kinerja Internal	10
5	Capaian Kinerja	20
Total		100

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, dengan parameter sebagai berikut :

3.17
Parameter Evaluasi Akuntabilitas

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80 – 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik , Akuntabel, bekerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60 – 70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki system yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
6.	C	>30 – 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0 – 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

Berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 terhadap 5 komponen tersebut dengan capaian kinerja 70,87 **(BB)**

dengan kategori interpretasi **sangat baik**. Berikut disajikan hasil evaluasi per komponen sebagai berikut :

Tabel 3.18
Tabulasi Nilai SAKIP Bapelitbangda tahun 2019

No	Komponen	Bobot	2020
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,68
2	Pengukuran Kinerja	25,00	15,31
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,15
4	Evaluasi Kinerja Internal	10,00	5,56
5	Capaian Kinerja	20,00	15,18
Jumlah Hasil Evaluasi		100,00	70,87

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.19
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	%	70,87	66,83	83,61

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara umum hasil evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan opini inspektorat Tahun 2021 mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2020 dengan capaian kinerja 66,83 (B) kategori interpretasi baik.

c. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Renstra (2016-2021)

Tabel 3.20
Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Akhir Renstra

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Target Akhir Renstra (2021)	Realisasi 2021	%
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	%	70,01	70,87	101,22

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara umum realisasi indikator Nilai SAKIP yang menjadi tolok ukur utama dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah pada tahun 2021 melebihi target akhir Renstra. Hal ini telah sejalan dengan target penilaian SAKIP Pemerintah Daerah Kab Luwu Timur untuk mendapatkan hasil evaluasi dengan nilai BB oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Diharapkan ditahun mendatang realisasi indicator ini dapat dipertahankan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah antara lain :

- Dukungan Pemerintah daerah dalam mewujudkan hasil evaluasi dengan nilai B oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui pelatihan dan pendampingan (studi banding dan coaching clinic);
- Telah menggunakan e-planning dalam perencanaan
- Telah mereviu dokumen Renstra tahun 2016 – 2021

- Renstra telah memuat indicator tujuan, indicator sasaran dan menyajikan IKU
- Telah memiliki dokumen perencanaan Kinerja Tahunan tahun 2020
- Telah memiliki dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Telah memiliki dokumen Rencana Aksi atas kinerja tahun 2020
- Telah memiliki perjanjian kinerja secara berjenjang

Beberapa permasalahan yang mempengaruhi pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah antara lain :

- a. Belum ada ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya;
- b. Pengukuran kinerja secara berjenjang belum sepenuhnya berjalan, masih berupa pemenuhan dokumen;
- c. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari Eselon IV ke atas belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward & punishment;

Alternatif solusi yang dilakukan dalam pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah antara lain :

- a. Langkah memperkuat komitmen pimpinan;
- d. Langkah penguatan tim fasilitasi SAKIP dan pendampingan dari tim Kemenpan-RB;
- e. Membuat ukuran kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja untuk dijadikan dasar penilaian terhadap staf.
- f. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari Eselon IV ke atas dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward & punishment;
- g. Hasil evaluasi rencana aksi ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Peningkatan kualitas sumberdaya pengelola SAKIP perangkat daerah dan pemanfaatan Sistem E-Sakip akan memberikan manfaat yang besar dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan/Sub kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran terwujudnya perencanaan yang partisipatif terdiri dari 1 program yaitu :

➤ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Program ini diukur melalui indikator persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran. Capaian kinerjanya sebesar 93,07%. Nilai capaian kinerja program ini merupakan **kategori sangat tinggi**. Realisasi keuangan sebesar Rp 4.275.791.779,- atau 86,65% dari pagu anggaran Rp 4.934.414.548,-, merupakan **kategori tinggi**. Program ini direalisasikan melalui 8 kegiatan dan 26 sub kegiatan. Adapun nama kegiatan/sub kegiatan, pagu anggaran dan realisasi dapat dilihat pada table di bawah :

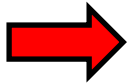
Tabel 3.21
Target dan Realisasi Kinerja
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

No	Program/Kegiatan	Uraian Kinerja					Ket
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	100	100	100	Mencapai Target
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Dokumen	3	3	100.00	Mencapai Target
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Dokumen	2	2	100.00	Mencapai Target
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	Dokumen	2	2	100.00	Mencapai Target
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Dokumen	2	2	100.00	Mencapai Target
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	95,16	95,16	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	Orang	31	28	90,32	Terdapat keosongan pada beberapa jabatan

							struktural
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Laporan	14	14	100	Mencapai Target
3.	Kegiatan Administrasi Brang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada perangkat daerah yang ditatausahakan	%	100	100	100	Mencapai Target
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	Laporan	4	4	100	Mencapai Target
4.	Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	100	96,66	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut	Stel	49	46	93,87	Terdapat keosongan pada beberapa jabatan struktural
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	Laporan	12	12	100	Mencapai Target
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	10	10	100	Mencapai Target
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	%	100	82,99	82,99	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	8	8	100	Mencapai Target
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Meter	25	25	100	Mencapai Target
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	Unit	3	3	100	Mencapai Target
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis	18	18	100	Mencapai Target
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Jenis	3	3	100	Mencapai Target

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Eksampla r	60	60	100	Mencapai Target
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	Dos	605	267	44,13	Tidak Mencapai Target
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kali	281	122	43,42	Tidak Mencapai Target
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Unit	75	75	100	Mencapai Target
	Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang diadakan	Unit	59	59	100	Mencapai Target
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan	Unit	15	15	100	Mencapai Target
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Unit	1	1	100	Mencapai Target
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	99,09	99,09	Tidak Mencapai Target
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Surat	850	827	97,29	Tidak Mencapai Target
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, air dan tv kabel yang terbayarkan	Rekening	36	36	100	Mencapai Target
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga upah jasa kebersihan dan sekuriti yang terbayarkan	Orang	3	3	100	Mencapai Target
8.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	49	26	53,06	Tidak Mencapai Target
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas oprasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	9	9	100	Mencapai Target
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	1	1	100	Mencapai Target

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	38	15	39,47	Tidak Mencapai Target
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya dan dipelihara / Rehabilitasi	Unit	1	1	100	Mencapai Target



Sasaran 4 : Terciptanya penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel 3.27
Analisis pencapaian kinerja sasaran 4

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	%
1	Terciptanya penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase perangkat daerah yang menghasilkan inovasi daerah (%)	%	41,03	15,38	37,48

Pencapaian indikator sasaran ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} & \quad \text{Jumlah perangkat daerah yang} \\
 \text{perangkat daerah} & \quad \text{Menghasilkan inovasi daerah} \\
 \text{yang menghasilkan} & = \frac{\text{-----}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100 \% \\
 \text{inovasi daerah} & \quad 6 \\
 & = \frac{\text{-----}}{39} \times 100 \% \\
 & = 15,38 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terciptanya penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2020 diperoleh nilai sebesar 15,38% dengan persentase capaian 37,48% dari target kinerja 41,03%. Nilai capaian kinerja program ini merupakan kategori sangat

rendah. Berikut disajikan perangkat daerah dan inovasi yang dihasilkan antara lain :

Tabel 3.28
Jumlah Perangkat Daerah dan Inovasi Yang Dihasilkan Tahun 2021

No.	Nama SKPD	JUDUL INOVASI
1	Dinas PTSP	SIKUMIS (Sistem Kurir Mengantar Izin)
	Dinas PTSP	SIKONGSIKIS (Sistem Layanan dan Konsultasi Perizinan ke Hilir)
2	Dinas Pertanian	FERMENHATI (Fermentasi Hasil Urine Sapi)
3	Dinas Perkimtan	Pembuatan Boiferi
4	Dinas Parbudmudora	Website Kuliner Luwu Timur
		Pola Hidup Sehat
5	Dinas Lingkungan Hidup	TUPOKSI (Tukar Pohon Pakai Sampah Plastik)
6	Dias Kesehatan	MARTABAK BERDASI (Mari Rangku Penderita Diabetes Melitus dan Hipertensi)
		BERPONDOK RIA (Berdayakan Masyarakat dalam dedikasi pondok malaria)

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.29
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1	Terciptanya penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase perangkat daerah yang menghasilkan inovasi daerah (%)	%	15,38	48,71	23,08

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara umum indikator kinerja Persentase perangkat daerah yang menghasilkan inovasi daerah pada tahun 2021 sebanyak 6 perangkat daerah (15,38%), dengan capaian kinerja **sangat rendah**. mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dua tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2020 yaitu 48,71% dan tahun 2019 yaitu 23,08%.

c. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Renstra (2016-2021)

Tabel 3.30
Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Akhir Renstra

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Target Akhir Renstra (2021)	Realisasi 2021	%
1	Terciptanya penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase perangkat daerah yang menghasilkan inovasi daerah	%	41.03	15,38	37,48

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara umum indikator kinerja persentase perangkat daerah yang menghasilkan inovasi daerah pada tahun 2021 belum memberikan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu dibutuhkan sinergi antara berbagai pihak baik perangkat daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat dan pihak swasta dalam upaya memaksimalkan target sasaran tersebut sampai akhir renstra.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian sasaran terciptanya penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lain :

- a. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah terkait inovasi daerah;
- b. Adanya Peraturan yang mengharuskan setiap Instansi Pemerintah Daerah wajib menciptakan minimal satu inovasi “one agency one innovation” pada setiap tahunnya;
- c. Adanya penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan melalui Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) Sulsel;
- d. Adanya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat nasional yang diselenggarakan setiap tahun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Beberapa permasalahan yang mempengaruhi pencapaian sasaran terciptanya penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lain :

- a. Masih terbatasnya pengalokasian anggaran untuk kegiatan inovasi;
- b. Pengetahuan dan pemahaman ASN terkait inovasi masih sangat rendah;
- c. Kurangnya pelaksanaan lomba/kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan setiap tahunnya.

Alternatif solusi yang dilakukan pencapaian sasaran terciptanya penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lain:

- Inovasi dimasukkan dalam program dan anggaran instansi
- Menjadikan inovasi sebagai budaya organisasi
- Memahami bahwa inovasi merupakan bagian dari tugas dan fungsi instansi;
- Membentuk tim inovasi daerah;
- Sosialisasi dengan dunia pendidikan sehingga dapat memicu perkembangan inovasi dan kreatifitas.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

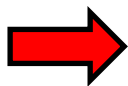
Peningkatan kapasitas aparatur dan memperbanyak kerjasama dengan institusi kelitbangan dan universitas adalah strategi yang perlu dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya.

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran meningkatnya penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu program penelitian dan pengembangan. Program ini direalisasikan melalui 4 (empat) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan. Akan tetapi pencapaian sasaran ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi melalui kegiatan sosialisasi penerapan inovasi daerah sebanyak 5 OPD dari total 39 opd lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Timur (15,38%). Realisasi anggaran kegiatan penunjang sasaran ini sebesar Rp 51.824.500,- atau 94,00% dari pagu anggaran Rp 55.134.950,-. ini merupakan **kategori sangat tinggi**. Kegiatan ini direalisasikan melalui 1 (satu) sub kegiatan yang dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.31
Target dan Realisasi Kinerja
pada Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Telnologi

No	Program/Kegiatan	Uraian Kinerja					Ket
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
1.	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi, teknologi dan hasil kelitbangan lainnya yang dikembangkan	Unit	3	3	100	
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah aparatur yng ditingkat kan kapasitasnya terkait sistem inovasi daerah	Orang	40	40	100	Mencapai Target


Sasaran 5 : Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan/inovasi daerah
a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel 3.32
Analisis pencapaian kinerja sasaran 5

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	%
1	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan/inovasi daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan/inovasi	%	33,33	38,46	115,39

Pencapaian indikator sasaran ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan/inovasi} &= \frac{\text{Jumlah hasil kelitbangan/inovasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kelitbangan/inovasi dalam Renja perangkat daerah}} \times 100 \% \\
 &= \frac{5}{13} \times 100 \% \\
 &= 38,46 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan/inovasi daerah pada tahun 2021 diperoleh nilai

sebesar 115,39%. Nilai capaian kinerja merupakan kategori sangat tinggi. Pada tahun 2021, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) menyusun 3 dokumen kelitbangan. Adapun dokumen kelitbangan yang diselesaikan yaitu Kajian peningkatan mutu dan nilai tambah lada di kabupaten Luwu Timur, Kajian pengembangan pariwisata peradaban kampong pandai besi di desa Matano kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur, dan Kajian Geopark

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.33
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun sebelumnya

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan/ inovasi daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan/inovasi	%	38,46	25,00	16,67

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara umum indikator kinerja Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan/inovasi pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Renstra (2016-2021)

Tabel 3.34
Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Akhir Renstra

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Target Akhir Renstra (2021)	Realisasi 2021	%
1	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan/ inovasi daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan/inovasi	%	33.33	38,46	115,39

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara umum indikator kinerja persentase pemanfaatan hasil kelitbangan/inovasi daerah sampai tahun 2021 memberikan hasil yang memuaskan. Akan tetapi masih dibutuhkan upaya-upaya yang lebih konkrit oleh tim kelitbangan daerah Kabupaten Luwu Timur untuk memaksimalkan pencapaian target sasaran Renstra yang berkaitan dengan kelitbangan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Beberapa permasalahan yang mempengaruhi pencapaian sasaran meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan/inovasi daerah antara lain :

- Tim Kelitbangan Daerah Kabupaten Luwu Timur belum berfungsi maksimal;
- Kurangnya koordinasi dan rapat-rapat teknis terkait kelitbangan/inovasi daerah;

Alternatif solusi yang dilakukan pencapaian sasaran meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan/inovasi daerah antara lain :

- Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian (universitas) serta instansi kelitbangan Kab/Kota;
- Mengadakan pertemuan kelitbangan/inovasi daerah secara berkala.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Peningkatan kapasitas aparatur dan mempebanyak dengan lembaga penelitian (universitas) serta instansi kelitbangan Kab/Kota adalah strategi dalam rangka Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan/inovasi terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan. Target kinerja untuk semua kegiatan tercapai 100% merupakan kategori sangat tinggi. Adapun nama kegiatan, sub kegiatan, target dan realisasi kinerja dapat dilihat pada table di bawah :

Tabel 3.35
Target dan Realisasi Kinerja
Program Penelitian dan Pengembangan

No	Program/Kegiatan	Uraian Kinerja					Ket
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
1.	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun	%	100	100	100	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah kelitbangan bidang pemerintahan umum yang difasilitasi, dilaksanakan dan dievaluasi	Kelitbang an	1	1	100.00	Mencapai Target
2.	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang disusun	%	100	100	100	
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen kajian penelitian dan pengembangan pariwisata yang disusun	Dokume n	1	1	100	Mencapai Target
3.	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil laporan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	%	100	100	100	
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen kajian penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan yang disusun	Dokume n	1	1	100	Mencapai Target

	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan lingkungan hidup yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100.00	Mencapai Target
--	--	---	---------	---	---	--------	-----------------

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan sampai triwulan ke IV tahun 2021 adalah sebesar Rp 7.729.437.180,- atau 81,43% dari total anggaran sebesar Rp 9.492.167.580,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.36
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	4.934.414.548	4.274.269.134	86,62
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.957.770	50.913.750	83,52
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.678.850	40.691.000	93,16
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.475.025	2.613.800	58,41
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.461.470	2.516.900	56,41
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.342.425	5.092.050	61,04
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.505.396.279	3.087.861.601	88,09
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	3.448.647.429	3.036.194.376	88,04
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	56.748.850	51.667.225	91,05
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.987.960	10.979.000	99,92
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.987.960	10.979.000	99,92
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	187.399.130	143.771.900	76,72
8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	36.200.000	33.450.000	92,40
9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11.629.130	8.885.900	76,41
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	139.570.000	101.436.000	72,68

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	448.091.400	345.584.150	77,12
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.736.900	1.441.000	30,42
02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12.500.000	12.500.000	100,00
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.500.000	4.500.000	100,00
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.545.900	6.620.050	62,77
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.200.000	9.593.800	38,07
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.180.000	6.120.000	99,03
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.800.000	5.380.000	28,62
No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	365.628.600	299.429.300	81,89
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	447.258.717	399.987.390	89,43
05	Pengadaan Mebel	87.700.000	86.737.200	98,90
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	259.208.717	225.862.700	87,14
09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.350.000	87.387.490	87,08
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.143.292	125.588.243	92,93
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.721.492	26.150.000	97,86
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.621.800	44.438.243	84,45
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.800.000	55.000.000	98,57
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.180.000	109.583.100	78,73
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.260.000	25.509.900	68,46
05	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	3.000.000	100,00
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.920.000	12.459.200	52,09
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000	68.614.000	91,49
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.066.248.525	1.576.018.083	76,27
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.448.766.619	1.081.774.083	74,67
01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	146.235.100	76.752.000	52,49
02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	125.859.900	60.357.500	47,96
03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	110.355.078	44.287.700	40,13
04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	96.814.863	37.536.565	38,77
05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	101.410.069	75.496.000	74,45
06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	65.952.938	64.927.918	98,45
07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	802.138.671	722.416.400	90,06

	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	107.753.906	95.530.000	88,66
01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	38.678.370	32.094.800	82,98
02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	55.881.043	52.206.200	93,42
03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	13.194.493	11.229.000	85,10
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	509.728.000	398.714.000	78,22
01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	283.074.000	223.309.400	78,89
02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	36.563.000	18.348.000	50,18
03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	190.091.000	157.056.600	82,62
No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.696.769.600	1.286.308.363	75,81
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	707.735.932	623.112.188	88,04
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	97.779.551	86.453.300	88,42
03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	84.470.232	66.989.338	79,31
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	224.179.084	213.564.600	95,27
07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	113.947.895	98.402.650	86,36
08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	187.359.170	157.702.300	84,17
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	559.242.070	303.506.375	54,27
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	91.169.600	43.868.000	48,12
03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	31.350.000	23.452.000	74,81
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	109.130.000	60.775.000	55,69
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	228.346.265	139.158.475	60,94
08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	99.246.205	36.252.900	36,53
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	429.791.598	359.689.800	83,69
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	68.799.820	62.424.800	90,73
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	54.189.176	39.185.000	72,31

05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	42.923.340	37.310.000	86,92
08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	263.879.262	220.770.000	83,66
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN	794.734.907	592.841.600	74,60
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	125.569.959	112.941.300	89,94
02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	125.569.959	112.941.300	89,94
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	229.944.999	217.278.100	94,49
05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	229.944.999	217.278.100	94,49
No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	384.084.999	210.797.700	54,88
04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	234.084.999	204.100.700	87,19
05	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	150.000.000	6.697.000	4,46
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	55.134.950	51.824.500	94,00
04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	55.134.950	51.824.500	94,00
		9.492.167.580	7.729.437.180	81,43

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja sampai triwulan IV Tahun 2021 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pencapaian kinerja yang diukur berdasarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan ini merupakan panduan bagi pimpinan dan pelaksana kegiatan untuk menghasilkan rancangan evaluasi program dan kegiatan yang konsisten sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan evaluasi pencapaian program/kegiatan/sub kegiatan akan lebih mudah untuk dilaksanakan dan diharapkan menjadi acuan dalam pembangunan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Luwu Timur sesuai Visi “Luwu Timur Terkemuka 2021”. Agar pelaksanaan Renstra SKPD berjalan sesuai dengan yang direncanakan serta tepat pada sasaran, perlu adanya evaluasi dan pelaporan kemajuan masing-masing kegiatan yang pada akhirnya dapat diketahui kinerja masing-masing kegiatan secara terukur dan akuntabel pada laporan kinerja (LAKIP).

Terhadap indikator kinerja yang belum dilakukan pengukuran dan belum memenuhi kriteria indikator yang baik, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi kami untuk memperbaiki guna mewujudkan cita-cita sesuai Visi “Luwu Timur Terkemuka 2021”.